



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Awal tahun 2026 dimaksud sebagai pedoman kerja selama 1 tahun periode anggaran dan sebagai jembatan antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kota Bekasi.

Tujuan utama dari penyusunan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ini adalah untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan di tingkat Kota dengan rencana program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 ini, tentu masih ditemukan berbagai kekurangan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara teratur untuk menilai efektifitasnya yang kemudian akan digunakan sebagai dasar di dalam merencanakan perubahan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Renja ini. semoga Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat sebagai arahan/pedoman pelaksanaan tugas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Bekasi, September 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BEKASI**

Dr. dr. KUSNANTO SAIDI, MARS
NIP. 19730618 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

Daftar Tabel dan Gambar III

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum 4

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematis Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI TAHUN
 LALU 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKB Kota Bekasi
 Tahun 2024 11

 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 12

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk
 dan Keluarga Berencana Kota Bekasi 22

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pada Dinas
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.. 24

 2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI 41

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana 44

 3.3 Program dan Kegiatan 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 78

BAB V PENUTUP 86

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	URAIAN	HAL
Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen RENJA dengan Dokumen RENJA K/L	2
Gambar 1.2.	Tidak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD	3
Tabel 2.1.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12
Tabel 2.2.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	14
Tabel 2.3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (UnmetNeed)	15
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB dan Pencapaian Renstra DPPKB s/d 2024	17
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bekasi	22
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Dan Pencapaian Renstra s.d 2024 DPPKB Kota Bekasi	30
Tabel 2.7.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 ..	40
Tabel 3.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKB Kota Bekasi ...	46
Tabel 3.2.	Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	51
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan DPPKB	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga rancangan awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman dengan regulasi dimaksud.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Dokumen Perencanaan 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau Rencana Kerja Operasional dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA PD. Maka dari itu Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun rancangan awal RENJA PD Tahun 2026 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana operasional 1 (satu) Tahunan sebagai penjabaran RPJMD.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkanlah kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun berikutnya.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut. Dengan adanya renja ini, diharapkan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta peningkatan keluarga kecil berkualitas melalui upaya pengendalian tingkat kelahiran, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jenjang Pelayanan KB berjalan dengan optimal.

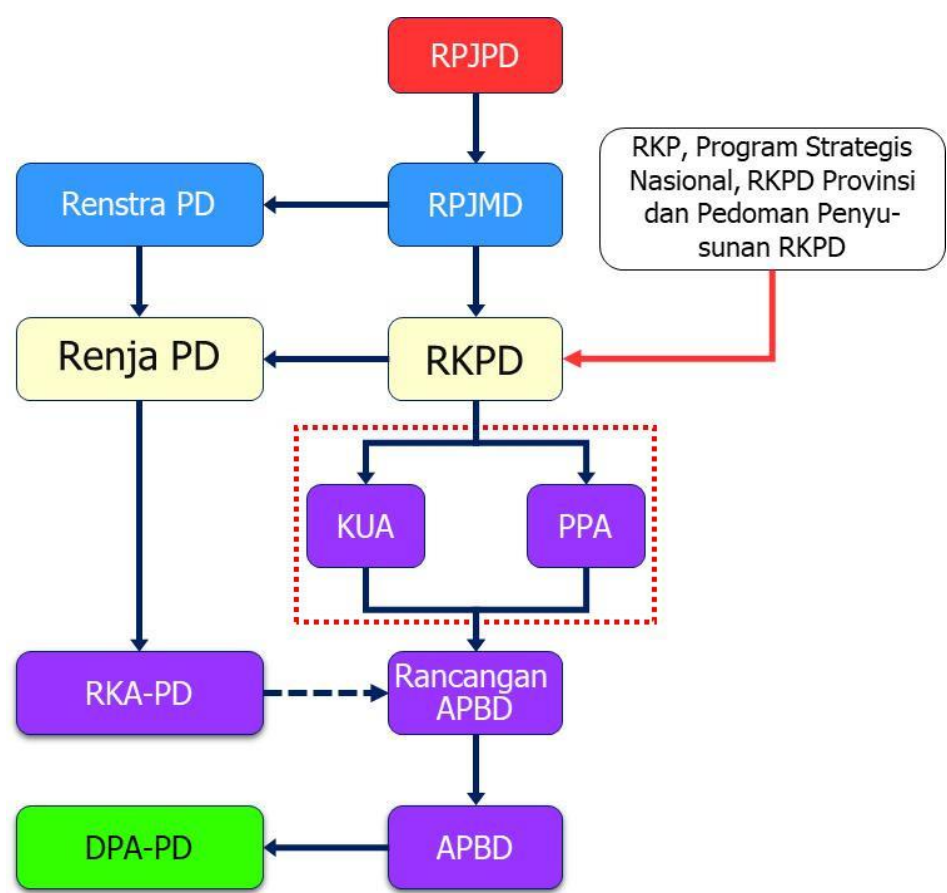
Gambar 1.1
Hubungan Dokumen RENJA dengan Dokumen RENJA K/L



Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Kweuarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 dengan Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dalam mewujudkan perencanaan program dan kegiatan yang terencana dengan baik sehingga implementasi program dan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien serta mempunyai manfaat untuk pelaksanaan tata kelola administrasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai daya ungkit dalam

pencapaian Visi Kota Bekasi yaitu “Kota Bekasi Yang Nyaman dan sejahtera” serta Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan Baik Jasmani Maupun Rohani yang Semakin Kondusif dan Berkelanjutan, pencapaian Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 serta Tema Pembangunan Visi dan Misi Wali Kota yaitu Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

Gambar 1.2.
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 89 Seri E);

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 2A Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 40);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1). Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi selaku Instansi Pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan (*good governance*) khususnya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
- 2). Mewujudkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagai Instansi Pemerintah yang akuntabel, transparan dan berjalan secara efisien dan efektif serta responsive;
- 3). Menyusun program indikatif yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- 4). Menyeleraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 dalam pedoman kerja dan operasional pada ruang lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tahunan;
2. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran organisasi dengan target yang terukur untuk mewujudkan sasaran organisasi;
3. Pagu indikatif kegiatan sesuai dengan program;
4. Urutan prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan; penganggaran; pelaksanaan; dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
6. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
7. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2026.
8. Mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi yang mempedomani Renstra Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KOTABEKASI

Pada bagian ini berisikan Tabel rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKB Kota Bekasi Tahun 2024

Untuk mengetahui pelaksana Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dengan cara menghitung menilai atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) awal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi selama tahun 2024 dan perkiraan target Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tahun 2025.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauh mana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam rantai kerja yang

harmonis antara masyarakat dan pemerintah, indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun pemerintah.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berikut disampaikan analisis dan evaluasi kinerja satu per satu indikator sasaran yang dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut ini :

1. Indikator Sasaran : Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel 2.1
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,5	31,82	120,08	27,5	31,44	114 %

Sumber : Seksi Data DPPKB Kota Bekasi

Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif MKJP (peserta KB yang saat ini menggunakan MKJP) dibandingkan terhadap Total seluruh peserta KB aktif pada periode yang sama yang dinyatakan dalam persentase. Dalam menjalankan program KKBPK, salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan persentase peserta KB Aktif MKJP. Tahun 2022 target ini dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bekasi. Dari target persentase

untuk peserta KB aktif MKJP sebesar 27,5%, berdasarkan data SKAP 2022 peserta KB aktif MKJP sudah mencapai 31,44%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ada penurunan realisasi

persentase peserta KB aktif MKJP dibandingkan target kinerja, yaitu dari 120,08 persen di tahun 2021 menjadi 114. persen di tahun 2022. Di tahun 2021, dari target 26,5 persen Kota Bekasi mampu mencapai 31,82 persen sedangkan di tahun 2022 dari target 27,5 persen tercapai 31,44 persen.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan :

1. Prosentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) seperti MOP, MOW, IUD dan Implant di Kota Bekasi makin meningkat seiring dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengatur kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang efektif dan efisein;
2. Kondisi tersebut didukung pula oleh akses dan;
3. Disamping itu kehadiran petugas lapangan keluarga berencana kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang memadai yang tersebar di Kota Bekasi; dan jaringan kader KB yang makin intens di masyarakat;
4. Dukungan pemerintah daerah yang secara kontinyue menyelenggarakan pelayanan KB pada setiap momentum kegiatan pada hari-hari besar nasional antara lain pada HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB kesehatan, Hari Keluarga Nasional, HUT RI, Hari Kontrasepsi se Dunia, Kesrak PKK, KB dan Kesehatan, Penutupan TMKK KB Kesehatan.

Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP dapat diartikan jumlah penggerakan Pelayanan KB yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi bekerja sama dengan Ikatan Bidan di Kota Bekas, khusus untuk Metode MKJP, yaitu :

- IUD
- Implant
- MOW
- MOP

Pemakaian alat kontrasepsi MKJP yang banyak digunakan oleh Pasangan Usia Subur di Kota Bekasi adalah IUD dan Implant sudah mencapai indikator sasaran, namun untuk metode MOW dan MOP tidak 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target pada item ini untuk tahun 2024 belum tercapai.

Capaian kinerja belum tercapai karena :

- Ketersediaan Provider MOP terbatas
- Dukungan APBD untuk bhaksos juga terbatas
- Belum terdukungnya pelayanan MOW Interval oleh BPJS Kesehatan

Untuk mempertahankannya adalah dengan tetap melaksanakan kegiatan pelayanan pemasangan Keluarga Berencana secara terus menerus dan tidak dipungut biaya.

2. **Indikator Sasaran : Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Tabel 2.2

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1.	Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	32,5	25,94	118	29,16	25,38	102

Sumber : Seksi Data DPPKB Kota Bekasi

Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (Tingkat Putus Pakai) kontrasepsi didefinisikan sebagai proporsi pemakai alat atau cara KB yang berhenti memakai alat atau cara tersebut dalam waktu satu tahun setelah mulai menggunakan alat/cara KB. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi diharapkan dapat serendah mungkin. Target Persentase tingkat putus pakai Kontrasepsi pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar 29,16%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ada penurunan persentase realisasi dibandingkan target kinerja, yaitu dari 32,5% di tahun 2021. Di tahun 2021, dari target 32,05% mampu mencapai 25,94% dengan capaian kinerja 118% sedangkan di tahun 2022 dari target 29,16% mampu mencapai 23,38%. Dengan capaian kinerja 102%.

3. **Indikator Sasaran : Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Tabel 2.3

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
(UnmetNeed)

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (UnmetNeed)	6	10,28	30%	5,75	9.04	24,6%

Sumber : Seksi Data DPPKB Kota Bekasi

Persentase Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai berikut :

- 1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB
- 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan)

Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Hasil 2022 menunjukkan bahwa angka unmet need di Kota Bekasi adalah 9.04%, meningkat 5,4% dibanding tahun 2021 ada 10,28 %.

Indikator Sasaran Unmet Need Kota Bekasi makin meningkat, seharusnya makin menurun dengan CPR yang makin tinggi dengan komposisi pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang yang meningkat maka Pasangan Usia Subur(PUS) Unmeet Need makin turun, akan tetapi realisasinya makin meningkat.

Hal-hal yang menyebabkan sebagai berikut :

- a. Unmet Need Kota Bekasi meningkat karena Pasangan usia Subur (PUS) secara total didominasi PUS muda paritas rendah, artinya PUS muda yang masih berencana ingin anak lagi. Unmet Need Kota Bekasi terdiri dari PUS migran yang berasal dari daerahlain dan menetap di Kota Bekasi;
- b. Unmet Need Kota Bekasi sebagian dipengaruhi oleh makin

panjangnyamasa subur (PUS umur 49-50 Tahun);

- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai macam kontrasepsi dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing;
- d. Rasa takut terhadap efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan kontasepsi akan menyebabkan penolakan terhadap pemakaian kontrasepsi.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan Unmet Need adalah dengan :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi PUS tentang kesehatan reporoduksi;
 - a. Melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas alat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian alkon efektif dan efisien harus diupayakan;
 - b. Pelayanan KB berkualitas.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB dan Pencapaian Renstra DPPKB s/d Tahun 2024

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	75,90	75,9		-	-
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	100	75,90	75,9			
2	SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		100	100	100	100			
D	KEGIATAN : Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	81.03	81.04			
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik		100	100	100	100			

2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan bahan komputer, Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat, tamu yang disediakan		100	100	87,83	87,83			
3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan		100	100	77,47	77,47			
4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan/peraturan dan perundang-undangan		100	100	83,37	83,37			
5	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas		100	100	36,03	36,03			
6	SUB KEGIATAN : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata/dikelola		100	100	88,92	88,92			
E	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	84,29	84,29			
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik		100	100	73,30	73,30			
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan		100	100	84,41	84,41			

F	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	84,60	84,60			
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional		100	100	77,10	77,10			
2	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang terpelihara		100	100	100	100			
3	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	100	99,43	99,43			
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
A	KEGIATAN : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100			
1	SUB KEGIATAN : Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga			100	100	100	100			

III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA									
A	KEGIATAN : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			100	100	97,27	97,27			
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Prosentase pencapaian pelayanan KB baru sebesar 1.080 akseptor		100	100	97,27	97,27			
B	KEGIATAN : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB			100	100	97.50	97.50			
1	SUB KEGIATAN : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			100	100	97,50	97,50	0		
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KS)	Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	8		6	5	83,3	7		
		Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB	65		55			60		
A	KEGIATAN : Pelaksanan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100	100	100	100			

1	SUB KEGIATAN : Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100	100	100	100			
B	KEGIATAN : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.		100	100	97,13	97,13			
1	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK)			100	100	97,13	97,13			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Analisis kinerja pelayanan DPPKB Kota Bekasi berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKB berdasarkan tugas dan fungsi DPPKB Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan DPPKB. Untuk menganalisis kinerja pelayanan DPPKB digunakan indikator sasaran, program, dan kegiatan DPPKB Kota Bekasi serta hasil analisis standar kebutuhan pelayanan di DPPKB Kota Bekasi. Berikut pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kota Bekasi.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bekasi

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Presentasi penggunaan kontrasepsi jangka Panjang		30%	25,5%	26,5%	27,5%	28,5%	30%	30 %	31,82%	31,44	27,5%	28,5%	
2	Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		23,70%	34,95%	32,05%	29,16%	26,38%	23,70%	34,95%	21,62%	25,38	29,165%	26,38%	
3	Unmet Need		5,00	6,30%	6,00%	5,75%	5,70%	5%	6,30%	9,43%	9.04	5,75%	5,50%	
4	Nilai AKIP			73.00%	73.50%	74.00%	74.50%	75%	73.06%	-	74,00	74,00%	74.5%	

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, (2) penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, (3) penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan (4) penetapan Renja Perangkat Daerah dengan indikator.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah aparatur DPPKB yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya;
2. Kurangnya sumber daya manusia pada kelompok jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan DPPKB;
4. Belum terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan informasi koordinasi dari instansi lain;
5. Peningkatan Kesadaran ber KB
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengendalikan jumlah dan kualitas keluarga.
7. Terbatasnya capaian peserta KB aktif terutama di wilayah tertentu (perkotaan vs pedesaan).
8. Prevalensi stunting masih tinggi

Dalam perkembangannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi organisasi perangkat daerah yang lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuaidengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidangdan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengendalian penduduk dan keluaraga berencana serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya DPPKB menghadapi berbagai isu atau permasalahan sosial di masyarakat, isu-isu didalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian penduduk, keluarga berencana dengan mengatasi masalah stunting, ketahanan keluarga, dan pendewasaan usia perkawinan
- b. Cakupan peserta KB aktif dan peserta baru belum optimal, terutama pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- c. Perkawinan dini berdampak pada meningkatnya risiko stunting, kesehatan ibu-anak, dan tingginya angka kemiskinan.
- d. Belum optimalnya integrasi program Bangga Kencana dengan percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga..

Dalam rangka mendukung pencapaian IPM Kota Bekasi yang pelaksanaannya mengacu pada 17 tujuan pokok SDG's, khususnya yang terkait dengan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni:

- a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun (Tanpa Kemiskinan);
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian yang berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
- c. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan);
- d. Menjamin Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (Pendidikan Berkualitas);
- e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan (Kesetaraan Gender);
- f. Menjamin kesediaan dan Pengelolaan air serta Sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Air Bersih dan Sanitasi);
- g. Menjamin akses energy yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang (Energi Bersih

dan Terjangkau);

- h. Mendorong Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak (Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak);
- i. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
- j. Menjadikan Kota dan pemukiman manusia inklusif aman, berketahan dan berkelanjutan (Keberlanjutan Kota dan Komunitas);
- k. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara (Mengurangi Kesenjangan);
- l. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi Bertanggung jawab);
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya (Aksi Terhadap Iklim);
- n. Melestarikan dan menggunakan samudra, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (Kehidupan Bawah Laut);
- o. Melindungi, memperbaharui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (Kehidupan di darat);
- p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan (Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian).

Tantangan yang dihadapi:

- a. Tingginya Migrasi

Rata-rata kenaikan jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapai 3% dari total jumlah penduduk 2.592.819 jiwa atau sekitar 77.785 orang pertahun. Menurut data terakhir Pemerintah Kota Bekasi diprediksi jumlah penduduk di wilayah Kota Bekasi bakal meningkat pada tahun 2023, yaitu mencapai 3,6 juta jiwa. (Sumber data: <http://www.beritasatu.com>)

b. Laju Pertumbuhan Penduduk Cukup Tinggi

Data menurut Susenas Tahun 2010-2016 LPP Jawa Barat 1,54, sedangkan untuk Indonesia 1,36. Selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 1.56 juta pada tahun 2010 menjadi 0.69 juta pada tahun 2035. Indonesia dari 1.38 juta pada tahun 2010 menjadi 0.62 juta pada tahun 2035. LPP Kota Bekasi sebesar 2,38 (SDKI Tahun 2017). Hal ini dipengaruhi oleh tingkat migrasi yang tinggi.

c. Kurangnya tenaga Penyuluh Lapangan

Kota Bekasi saat ini hanya mempunyai 1:1 tenaga penyuluh sedangkan idealnya adalah satu kelurahan mempunyai dua tenaga penyuluh.

d. *UNMET NEED* Tinggi

Pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi belum berKB dan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda tetapi belum berKB masih tinggi. Hal ini terkait dengan PUS Muda paritas rendah yang masih tinggi, disamping itu Migrasi yang datang ke Kota Bekasi makin banyak.

e. Masih Rendahnya Partisipasi Pria dalam ber-KB

Peluang yang ada:

- a. Dukungan sarana dan prasarana dari BKKBN dan BPJS BKKBN menyediakan alokon, tenaga PLKB yang melakukan penggerakan pelayanan MKJP, dan BPJS Kesehatan menyediakan jasa pelayanan KB.
- b. Komitmen/kesepakatan bersama antara DPPKB–Dinkes–IBI Kota Bekasi.

Keterkaitan arah kebijakan dan program/kegiatan prioritas yang akan disinergikan melalui kemitraan DPPKB–Dinkes–IBI Kota Bekasi.

Rencana program dan kegiatan dalam revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kota Bekasi yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Visi dan Misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bekasi.

Rencana Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026 adalah:

1. Tema adalah Peningkatan Masyarakat dan Kapasitas Ekonomi;
2. Prioritas:
 - Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi;
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan;
 - Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan;
 - Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial dan kearifan budaya;
 - Pengembangan *creative society*;
3. Sasaran:

Memperluas akses pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat Kota Bekasi;

 - Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang didukung IT;
 - Meningkatnya akses layanan Kesehatan masyarakat;
 - Terwujudnya kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
 - Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif;
 - Meningkatnya toleransi, kesetaraan dan kerjasama sosial.

Dinas Pengendalian Penduduk mendukung Prioritas Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses layanan Kesehatan masyarakat melalui 4 Program dan Kegiatan maka diperlukan ini, diperlukan:

1. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas berdasarkan RKPD.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB dan Pencapaian Renstra DPPKB s/d Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

No.	Rencana Tahun 2024 (N)					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renstra, Renja, Perkin, LKIP, SAKIP dan IKK)			Rp 10.000.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renstra, Renja, Perkin, LKIP, SAKIP dan IKK)			Rp. 10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN Dispora		100%	Rp 10.600.000.000,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN Dispora	100%	Rp10.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		100%			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Disiplin Aparatur					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Disiplin Aparatur			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu, Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya		100%	Rp 170.000.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu, Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya	100%	Rp 170.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		100%	Rp 50.000.000,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100%	Rp 50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik		100%	Rp 50.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan elektronik	100%	Rp 50.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Disediakan		100%	Rp 50.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Disediakan	100%	Rp 50.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan bahan komputer, Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat, tamu yang disediakan		100%	Rp 300.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan bahan komputer, Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat, tamu yang disediakan	100%	Rp 300.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan		100%	Rp 160.000.000,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan	100%	Rp 160.000.000,00	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan/peraturan dan perundang-undangan		100%	Rp 55.000.000,00		Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan/peraturan danperundang-undangan	100%	Rp 55.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ perjalanan dinas		100%	Rp 200.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	100%	Rp 200.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata/dikelola		100%	Rp 50.000.000,00		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yangditata/dikelola	100%	Rp 50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang tersedia		100%	Rp 150.000.000,00		Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang tersedia	100%	Rp 150.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran					Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik		100%	Rp 70.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon,internet, air dan listrik	100%	Rp 70.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan		100%	Rp 2.200.000.000,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan	100%	Rp 2.200.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur					Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional		100%	Rp 350.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	100%	Rp 350.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang terpelihara		100%	Rp 60.000.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang terpelihara	100%	Rp 60.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	Rp 150.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Rp 150.000.000,00	

	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	PROSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI /CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH		79	Rp 4.600.000.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	PROSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI /CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH	79	Rp 4.600.000.000	
	KEGIATAN : Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Terlaksananya Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah			Rp 1.925.000.000		KEGIATAN : Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Terlaksananya Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah		Rp 1.925.000.000	
	SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Prosentase pencapaian pelayanan KB baru sebesar 1.080 akseptor		100%	Rp 1.000.000.000		SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Prosentase pencapaian pelayanan KB baru sebesar 1.080 akseptor	100%	Rp 1.000.000.000	
	SUB KEGIATAN : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase distribusi alat obat kontrasepsi ke 167 klinik dalam se tahun		80%	Rp 150.000.000		SUB KEGIATAN : Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase distribusi alat obat kontrasepsi ke 167 klinik dalam se tahun	80%	Rp 150.000.000	
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kompetensi Pengelola Dan Petugas Logistik Alat Dan Obat Kontrasepsi	Prosentase peningkatan keterampilan teknis pengelolaan logistik alat kontrasepsi 167 orang		100%	Rp 100.000.000		SUB KEGIATAN : Peningkatan Kompetensi Pengelola Dan Petugas Logistik Alat Dan Obat Kontrasepsi	Prosentase peningkatan keterampilan teknis pengelolaan logistik alat kontrasepsi 167 orang	100%	Rp 100.000.000	
	SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang KB	Prosentase pemenuhan rencana kebutuhan alat obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB 12 bulan		100%	Rp 100.000.000		SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang KB	Prosentase pemenuhan rencana kebutuhan alat obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB 12 bulan	100%	Rp 100.000.000	
	SUB KEGIATAN : Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Dan Hak-hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Dan Kelompok Kegiatan	Terlaksanakannya promosi dan konseling Kespro untuk Toma, Toga, Poktan di 12 kecamatan		100%	Rp 225.000.000		SUB KEGIATAN : Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Dan Hak-hak Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksanakannya promosi dan konseling Kespro untuk Toma, Toga, Poktan di 12 Kecamatan	100%	Rp 225.000.000	
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro	Workshop Komunikasi interpersonal/konseling sebanyak 85 orang		100%	Rp 200.000.000		SUB KEGIATAN : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro	Workshop Komunikasi interpersonal/konseling sebanyak 85 orang	100%	Rp 200.000.000	

	SUB KEGIATAN : PeningkatanKesertaan KB Pria	Pelaksanaan Pelayanan KBMOP dan pengembangan paguyuban KB Pria di 12 kecamatan		100%	Rp 150.000.000		SUB KEGIATAN : PeningkatanKesertaan KB Pria	Pelaksanaan Pelayanan KBMOP dan pengembangan paguyuban KB Pria di 12 kecamatan	100%	Rp 150.000.000	
	KEGIATAN: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Derah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaandan Peningkatan Peran serta Organisasi			Rp 575.000.000		KEGIATAN: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Derah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaandan Peningkatan Peran serta Organisasi		Rp 575.000.000	
	SUB KEGIATAN : Penguatan Peran SertaOrganisasi Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan PembinaanKesertaan Ber KB	Evaluasi dan pembinaanakseptor di 12 kecamatan		100%	Rp 325.000.000		SUB KEGIATAN : Penguatan Peran SertaOrganisasi Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan PembinaanKesertaan Ber KB	Evaluasi dan pembinaanakseptor di 12 kecamatan	100%	Rp 325.000.000	
	SUB KEGIATAN : Pembinaan TerpaduKampung KB	Pelayanan KB Baru di Kampung KB sebanyak 15 Kp KB		100%	Rp 250.000.000		SUB KEGIATAN : Pembinaan TerpaduKampung KB	Pelayanan KB Baru di Kampung KB sebanyak 15 Kp KB	100%	Rp 250.000.000	
	KEGIATAN: Pendayagunaan Tenagapenyuluha KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB			Rp 400.000.000		KEGIATAN: Pendayagunaan Tenagapenyuluha KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB		Rp 400.000.000	
	SUB KEGIATAN: Penyediaan saranapendukung operasional PKB/PLKB	Terlaksananya Rapat evaluasiUPTD PP, Rapat pembinaan IPeKB, Lomba PKB, Pos KB, TPD, Pembinaan PKB/PLKB,Pembinaan Pos KB, Pembinaan Forum Pos KB,		100	Rp 200.000.000		SUB KEGIATAN: Penyediaan saranapendukung operasional PKB/PLKB	Terlaksananya Rapat evaluasiUPTD PP, Rapat pembinaan IPeKB, Lomba PKB, Pos KB, TPD, Pembinaan PKB/PLKB,Pembinaan Pos KB, Pembinaan Forum Pos KB,	100	Rp 200.000.000	
	SUB KEGIATAN: Penggerakkan KaderInstitusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan(IMP)	Terlaksananya pelatihan Program Bangga Kencana, Pembinaan PPKBD tingkat Kecamatan, Pembinaan sub PPKBD tingkat kelurahan		100	Rp 200.000.000		SUB KEGIATAN: Penggerakkan KaderInstitusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan(IMP)	Terlaksananya pelatihan Program Bangga Kencana, Pembinaan PPKBD tingkat Kecamatan, Pembinaan sub PPKBD tingkat kelurahan	100	Rp 200.000.000	
	KEGIATAN: Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaandan Peningkatan Peran serta Organisasi			Rp 550.000.000		KEGIATAN: Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi		Rp 550.000.000	

	SUB KEGIATAN: Pelaksanaan danPengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya pembentukan Kampung KB baru, Pelatihan Kampung KB, Pembinaan Kader Kampung KB, Sosialisasi Kampung KB Lintas Sektor, Pembuatan sarana dan prasarana kampung KB		100	Rp 300.000.000		SUB KEGIATAN: Pelaksanaan danPengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya pembentukan Kampung KB baru, Pelatihan Kampung KB, Pembinaan Kader Kampung KB, Sosialisasi Kampung KB Lintas Sektor, Pembuatan sarana dan prasarana kampung KB	100	Rp 300.000.000	
	SUB KEGIATAN: Integrasi PembangunanLintas Sektor di Kampung KB	Pembentukan dan Pegembangan Kampung KB		100	Rp 250.000.000		SUB KEGIATAN: Integrasi PembangunanLintas Sektor di Kampung KB	Pembentukan dan Pegembangan Kampung KB	100	Rp 250.000.000	
	KEGIATAN: Pelaksanaan Advokasi, KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal			Rp 1.150.000.000		KEGIATAN: Pelaksanaan Advokasi, KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal		Rp 1.150.000.000	
	SUB KEGIATAN: Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media MasaCetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terselenggaranya pemutaranFilm Keluarga Berencana di 56 Kelurahan dan Talk Show 20 kali siar		100	Rp 250.000.000		SUB KEGIATAN: Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media MasaCetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terselenggaranya pemutaranFilm Keluarga Berencana di 56 Kelurahan dan Talk Show 20 kali siar	100	Rp 250.000.000	
	SUB KEGIATAN :Pelaksanaan HariKeluarga Nasional (Harganas)	Peringatan Harganas		100	Rp 700.000.000		SUB KEGIATAN :Pelaksanaan HariKeluarga Nasional (Harganas)	Peringatan Harganas	100	Rp 700.000.000	
	SUB KEGIATAN: Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Pembuatan Rool Benner, pembuatan Umbul-umbul, Spanduk, Leaflet, Baligho		100	Rp 200.000.000		SUB KEGIATAN: Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Pembuatan Rool Benner, pembuatan Umbul-umbul, Spanduk, Leaflet, Baligho	100	Rp 200.000.000	

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Cakupan dataMikro Keluarga.		78	Rp 900.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Cakupan data Mikro Keluarga.	78	Rp 900.000.000	
	KEGIATAN: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk engumpulan Data Keluarga			Rp 900.000.000		KEGIATAN: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk engumpulan Data Keluarga		Rp 900.000.000	
	SUB KEGIATAN: Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Tersuusnya Grand Design Pengendalian Penduduk Kota Bekasi		100	Rp 300.000.000		SUB KEGIATAN: Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Tersuusnya Grand Design Pengendalian Penduduk Kota Bekasi	100	Rp 300.000.000	
	SUB KEGIATAN: Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Updating data keluarga dan laporan hasil capaian Program		100	Rp 300.000.000		SUB KEGIATAN: Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya Updating data keluarga dan laporan hasil capaian Program	100	Rp 300.000.000	
	SUB KEGIATAN: Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pendataan Keluarga Tahun 2021		0	Rp -		SUB KEGIATAN: Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pendataan Keluarga Tahun 2021	0	Rp -	
		Terlaksananya saresehan hasil pendataan dan pelaporannya		100	Rp 300.000.000		SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Saresehan hasil pemutakhiran data keluarga	Terlaksananya saresehan hasil pendataan dan pelaporannya	100	Rp 300.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan		8			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	8		
		Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB		65	Rp 5.925.000.000			Perentase Cakupan Anggota Poktan ber-KB	65	Rp 5.925.000.000	
	KEGIATAN: Pelaksanaan Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.	Terlaksananya Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.			Rp 5.625.000.000		KEGIATAN: Pelaksanaan Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.	Terlaksananya Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.		Rp 5.625.000.000	

	SUB KEGIATAN: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PIK-R dan BKR ProPN yang aktif		62	Rp 500.000.000		SUB KEGIATAN: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PIK-R dan BKR Pro PN yang aktif	62	Rp 500.000.000	
		Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi Generasi Berencana		300	Rp 400.000.000			Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi Generasi Berencana	300	Rp 400.000.000	
	SUB KEGIATAN : Advokasi dan PromosiIPK	Jumlah PIK-R dan BKR ProPN yang aktif		62	Rp 500.000.000		SUB KEGIATAN : Advokasi dan PromosiIPK	Jumlah PIK-R dan BKR Pro PN yang aktif	62	Rp 500.000.000	
	SUB KEGIATAN : Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Programyang Mendukung tercapainya IPK.	Jumlah kebijakan dalam menunjang program tercapainya IPK		1	Rp 450.000.000		SUB KEGIATAN : Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Programyang Mendukung tercapainya IPK.	Jumlah kebijakan dalam menunjang program tercapainya IPK	1	Rp 450.000.000	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah materi yg di laksanakan		5	Rp 300.000.000		SUB KEGIATAN : Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah materi yg dilaksanakan	5	Rp 300.000.000	
	SUB EGIATAN : Pelaksanaan KoordinasiEvaluasi Pencapaian IPK	Jumlah koordinasi evaluasi dalam pencapaian IPK		5	Rp 400.000.000		SUB EGIATAN : Pelaksanaan KoordinasiEvaluasi Pencapaian IPK	Jumlah koordinasi evaluasi dalam pencapaian IPK	5	Rp 400.000.000	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah forum Genre			Rp 450.000.000		SUB KEGIATAN : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah forum Genre		Rp 450.000.000	

	SUB KEGIATAN : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga {BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK/R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga}	Terbarunya (valid) Data Base Tribina (BKB, BKR dan BKL) 100 %		168	Rp 500.000.000		SUB KEGIATAN : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga {BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK/R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga}	Terbarunya (valid) Data Base Tribina (BKB, BKR dan BKL) 100 %	168	Rp 500.000.000	
		Pendampingan dana operasional 1.000 HPK		60 orang	Rp 350.000.000			Pendampingan dana operasional 1.000 HPK	60 orang	Rp 350.000.000	
		Pendampingan dana operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)		50 Kelompok	Rp 450.000.000			Pendampingan dana operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)	50 Kelompok	Rp 450.000.000	
	SUB KEGIATAN : Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P3KS, PIK/R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS	Jumlah sarana dan prasarana		100	Rp 300.000.000		SUB KEGIATAN : Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK/R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)	Jumlah sarana dan prasarana	100	Rp 300.000.000	
	SUB KEGIATAN :Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga {BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS}	Jumlah pengadaan pelatihan Teknis		100	Rp 350.000.000		SUB KEGIATAN :Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga {BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS}	Jumlah pengadaan pelatihan Teknis	100	Rp 350.000.000	

	SUB KEGIATAN : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana {Kader}, Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga { BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK/R dan pemberdayaan Ekonoi Keluarga}	Jumlah biaya operasional kader Tri Bina		100	Rp675.000.000		SUB KEGIATAN : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana {Kader}, Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga { BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK/R dan pemberdayaan Ekonoi Keluarga}	Jumlah biaya operasionalkader Tri Bina	100	Rp675.000.000	
	KEGIATAN: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga.			Rp300.000.000		KEGIATAN: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga.		Rp300.000.000	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah peserta KB Baru		100	Rp300.000.000		SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah peserta KB Baru	100	Rp300.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2023 ada usulan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diusulkan melalui dari Musrembang Kelurahan hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan Masyarakat lebih tepat sasaran dan tepat guna. dimungkinkan karena program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirasa cukup oleh masyarakat dalam mengakomodir kebutuhan Masyarakat. Dimulai dari Pramusrembang kemudian Penyusunan RKPD baru penyusunan Rancangan Renja Dians Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, kemudian dilanjutkan dengan Musrembang Kecamatan, Musrembang Kota, Rancangan Akhir RKPD 2023, Penetapan RKPD 2023 baru Rancangan Akhir dilanjutkan dengan Penetapan Renja Dinas.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bekasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat diharapkan agar indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan pelayanan oleh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada masyarakat. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah untuk mencapai Visi ***“Kota Bekasi Yang Nyaman dan sejahtera”*** melalui Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan Baik Jasmani Maupun Rohani yang Semakin Kondusif dan Berkelanjutan sesuai RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memfokuskan kinerja pelayanannya pada kelompok sasaran Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu Hamil dan Nifas, serta pasangan yang ingin membatasi jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan, serta Pengendalian Penduduk, selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi juga membidik remaja melalui program Generasi Berencana (Genre) dan keluarga secara keseluruhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok Peningkatan Usaha Keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu:

- a. Pengendalian Penduduk;
- b. Keluarga Berencana (KB);
- c. Keluarga Sejahtera, serta
- d. Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2025 - 2029 yang mengacu pada RPJMN 2025 - 2029 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni :

- a. Organisasi;
- b. Tatalaksana;
- c. Peraturan Perundang – Undangan;
- d. Sumber daya manusia;
- e. Pengawasan;
- f. Akuntabilitas;
- g. Pelayanan publik, serta
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, aka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Total Fertility Rate (TFR) sehingga Penduduk Tumbuh Seimbang. Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Dalam

rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR 2.1 point dan NRR 1 point, maka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehidupan Berkeluarga
 1. Mendorong remaja dan calon pasangan usia subur untuk mengikuti program edukasi dan konseling pranikah.
 2. Memperkuat peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
 - b. Penguatan Program Bangga Kencana
 1. Meningkatkan kesertaan dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi modern.
 2. Memperluas cakupan pelayanan KB yang merata dan terjangkau.
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif keluarga melalui kelompok UPPKSA(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
 2. Fasilitasi akses keluarga ke lembaga keuangan dan pelatihan keterampilan.
 - d. Penguatan Ketahanan Sosial dan Mental Spiritual
 1. Membina keluarga dalam nilai-nilai agama, budaya, dan gotong royong.
 2. Peningkatan fungsi komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.
 - e. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi
 1. Memperluas layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
 2. Pencegahan pernikahan dini, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga.
 - f. Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi
 1. Mengoptimalkan pendataan keluarga dan pemutakhiran data secara berkala.
 2. Memanfaatkan digitalisasi untuk layanan, edukasi, dan pemantauan keluarga.
 - g. Kemitraan dan Kolaborasi
 1. Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
 2. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader PKK dalam program pemberdayaan keluarga.
- Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah

Kota Bekasi, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengacu pada prioritas Meningkatnya Ketangguhan Keluarga dengan kebijakan :

- a. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB
- c. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- d. Pendayagunaan Tenaga penyuluha KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB)
- e. Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
- f. Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal
- g. Pelaksanaan Pembangaunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- h. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, maka dirumuskan tujuan yaitu sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis 2025-2029.

Adapun tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Ketangguhan Keluarga

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka sasaran dan Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas.

Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Strategi :

- a. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehidupan Berkeluarga
 1. Mendorong remaja dan calon pasangan usia subur untuk mengikuti program edukasi dan konseling pranikah.
 2. Memperkuat peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- b. Penguatan Program Bangga Kencana
 1. Meningkatkan kesertaan dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi modern.
 2. Memperluas cakupan pelayanan KB yang merata dan terjangkau.
- c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif keluarga melalui kelompok UPPKSA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
 2. Fasilitasi akses keluarga ke lembaga keuangan dan pelatihan keterampilan.
- d. Penguatan Ketahanan Sosial dan Mental Spiritual
 1. Membina keluarga dalam nilai-nilai agama, budaya, dan gotong royong.
 2. Peningkatan fungsi komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.
- e. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi
 1. Memperluas layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
 2. Pencegahan pernikahan dini, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi
 1. Mengoptimalkan pendataan keluarga dan pemutakhiran data secara berkala.

2. Memanfaatkan digitalisasi untuk layanan, edukasi, dan pemantauan keluarga.
- g. Kemitraan dan Kolaborasi
 1. Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
 2. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader PKK dalam program pemberdayaan keluarga.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2026
1.	Meningkatnya Ketangguhan Keluarga	Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persen	69.10 %

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 didasarkan pada Renstra DPPKB Tahun 2025-2029.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan operasionalisasi dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta dukungan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Efektivitas dan

efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, pada tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Total pagu yang dibutuhkan sebanyak Rp. 18.034.115.883,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan

Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informa

- Sub Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
 - Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
 - Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024 Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						18,034,115,883.00							2,555,000,000.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18,034,115,883.00							2,555,000,000.00
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						18,034,115,883.00							2,555,000,000.00
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	-			100 %	15,357,823,875.00						-	280,000,000.00
		[meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dan penganggaran]	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	100	100	100	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			5 Laporan	5,000,000.00			-	-	DPPKB	-	5,000,000.00
	2.14.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DPPKB		5,000,000.00
		-	-	-	-	-	-	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD seseuai NSPK	-			6 Laporan 5 Laporan	13,139,966,000.00			-	-	-	-	5,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1372 Orang/ bulan	13,134,966,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0.00
		[meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan]	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88.5	86.5.5	87.5	87.8	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
	2.14.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		5,000,000.00
		-	-	-	-	-	-	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	85,000,000.00			-	-	-	-	0.00
	2.14.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	85,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	-			18 Laporan	850,592,875.00			-	-	DPPKB	-	70,000,000.00
	2.14.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	550,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DPPKB		0.00
	2.14.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20,592,875.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DPPKB		0.00
		[meningkatnya nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara IP ASN perangkat daerah]	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88.5	85.31	86	86.5	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
	2.14.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	60,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DPPKB		70,000,000.00
		-	-	-	-	-	-	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
	2.14.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	170,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	DPPKB		0.00
	2.14.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPPKB		0.00
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 %	150,000,000.00			-	-	-	-	0.00
	2.14.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	330,525,000.00			-	-	-	-	0.00
	2.14.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0.00
	2.14.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan Laporan	275,525,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00
		[meningkatnya pengelolaan barang milik daerah]	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100	100	100	15,357,823,875.00	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 %	796,740,000.00			-	-	-	-	200,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	300,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0.00
	2.14.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	250,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0.00
	2.14.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	46,740,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		50,000,000.00
	2.14.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				12 Unit	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	-			1 Laporan	300,000,000.00						-	300,000,000.00
		-	-	-	-	-	-	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000,000.00
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Advokasi,sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP serta Jalur Formal dan Informal Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-			1 Laporan 22 Perangkat Daerah	200,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD dan Sekolah di Kota Bekasi	-	200,000,000.00
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				1 laporan Satuan Pendidika n	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	OPD dan Sekolah di Kota Bekasi		100,000,000.00
	2.14.02.2.01 .0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				22 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD dan Sekolah di Kota Bekasi		100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk diTingkat Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	100,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere	-	Kader, masyarakat dan OPD terkait	-	100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.14.02.2.02 .0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- andang disabilitas.	-	Kader, masyarakat dan OPD terkait		100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	-			13 % 24,67 % 56 %	1,299,475,000.00						-	1,375,000,000.00
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan	-			3 Laporan	575,000,000.00			Memperkuat pembangun an sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Mewujudk a n Sumber Daya Manusia Berkarakt er Unggul	OPD, Kader, Masyarakat dan Mitra Kerja	-	575,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.2.01 .0008	Pengendalian Program KKBPK													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	175,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyang- gandisabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	OPD, Kader, Masyarakat dan Mitra Kerja		175,000,000.00
	2.14.03.2.01 .0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD, Kader, Masyarakat dan Mitra Kerja		150,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan	10 22.67 62	18.5 25.67 50	14 25.17 55	13 24.67 56	1,299,475,000.00	-	-	-	-	-	-	1,375,000,000.00
	2.14.03.2.01 .0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	250,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkut pembangun an sumber daya manusia , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	OPD, Kader, Masyarakat dan Mitra Kerja		250,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	1,299,475,000.00	-	-	-	-	-	-	1,375,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-			250 orang 10 Organisasi	100,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- andang disabilitas.	-	Organisasi	-	100,000,000.00
	2.14.03.2.02 .0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				10 Organisasi	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Organisasi		100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-			1314 Orang	524,475,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Akseptor, Kader, Petugas Pelayanan KB, Petugas Penyuluh KB	-	600,000,000.00
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1314 Orang	524,475,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Akseptor, Kader, Petugas Pelayanan KB, Petugas Penyuluh KB		600,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	100,000,000.00			-	-	-	-	100,000,000.00
	2.14.03.2.04 .0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Kampung	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100,000,000.00
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	-			6 %	1,076,817,008.00						-	600,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sekolah Lansia	-			25 Sekolah	876,817,008.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Peserta Sekolah Lansia	-	450,000,000.00
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				13 Kegiatan	576,817,008.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang- gandisabilitas.	-	Peserta Sekolah Lansia		0.00
	2.14.04.2.01 .0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	Peserta Sekolah Lansia		200,000,000.00
	2.14.04.2.01 .0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akteptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				0 Kelompok	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Peserta Sekolah Lansia		250,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-			1 Laporan	200,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	-	OPD terkait, Kader dan Masyarakat	-	150,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											milennial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.				
	2.14.04.2.02 .0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-	OPD terkait, Kader dan Masyarakat		150,000,000.00	
	J U M L A H							18,034,115,883.00							2,555,000,000.00	

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			18,034,115,883.00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18,034,115,883.00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			18,034,115,883.00		
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</i>	100 %	15,357,823,875.00		
		[meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dan penganggaran]	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	5,000,000.00		
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD
		-	-	-	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD sesuai NSPK</i>	6 Laporan 5 Laporan	13,139,966,000.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1372 Orang/bulan	13,134,966,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		[meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan]	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	87.8	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	5,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		-	-	-	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	85,000,000.00		
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	85,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK</i>	18 Laporan	850,592,875.00		
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	550,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	20,592,875.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		[meningkatnya nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara IP ASN perangkat daerah]	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	86.5	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		-	-	-	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %	150,000,000.00		
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	330,525,000.00		
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan Laporan	275,525,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		[meningkatnya pengelolaan barang milik daerah]	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	15,357,823,875.00	-	-
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	100 %	796,740,000.00		
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 Unit	300,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit	250,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	46,740,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	12 Unit	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	1 Laporan	300,000,000.00		
		-	-	-	300,000,000.00	-	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP serta Jalur Formal dan Informal Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	1 Laporan 22 Perangkat Daerah	200,000,000.00		
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal					
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 laporan Satuan Pendidikan	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah					
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	22 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk diTingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan	100,000,000.00		
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota					
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	13 % 24,67 % 56 %	1,299,475,000.00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal yang dilaksanakan	3 Laporan	575,000,000.00		
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK					
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	175,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	13 24.67 56	1,299,475,000.00	-	-
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	250,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		-	-	-	1,299,475,000.00	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	250 orang 10 Organisasi	100,000,000.00		
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	10 Organisasi	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	1314 Orang	524,475,000.00		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	1314 Orang	524,475,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	100,000,000.00		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	10 Kampung	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan</i>	6 %	1,076,817,008.00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Sekolah Lansia</i>	25 Sekolah	876,817,008.00		
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL					
			<i>Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia</i>	13 Kegiatan	576,817,008.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					
			<i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</i>	0 Kelompok	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>	1 Laporan	200,000,000.00		
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
			<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>	1 laporan	200,000,000.00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H				18,034,115,883.00		

BAB V

PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyatakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 tindak lanjut Visi Kota Bekasi Kota Bekasi Yang Nyaman dan sejahtera dan Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan Baik Jasmani Maupun Rohani yang Semakin Kondusif dan Berkelanjutan yang merupakan sebagai dasar Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Ketangguhan Keluarga.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk Tahun 2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, nantinya

menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2026 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BEKASI**



Dr. dr. KUSNANTO SAIDI, MARS
NIP. 19730618 200312 1 001